BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1983, DJP secara berkesinambungan mengadakan perubahan pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak. Akan tetapi, sebagian masyarakat Indonesia memandang wajib pajak sebagai beban. Berkurangnya daya beli atau belanja dan kemampuan wajib pajak diakibatkan dari sumber daya sektor bisnis ke sektor pemerintah (Arieftiara et al., 2015). Hingga kini pelaku wajib pajak masih berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan manajemen pajak (Faradiza, 2019). Pada perusahaan publik, *stakeholder* berniat supaya manajer mengambil keputusan bisnis yang selaras dengan kepentingan perusahaan, begitu juga dengan keputusan manajer yang terkait dengan pajak. Para *stakeholder* meniatkan supaya keputusan yang diambil pada akhirnya dapat menaikkan nilai perusahaan beserta laba setelah adanya pajak.

Tax avoidance merupakan rancangan transaksi disampaikan guna mengecilkan biaya pajak, caranya yaitu memanfaatkan kelemahan pajak disuatu negeri. Di Indonesia ada 2 cara dilalui oleh wajib pajak guna mengecilkan besarnya pajak dengan cara legal (*tax avoidance*) dan dengan cara illegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* yang dilakukan secara legal dilakukan dengan cara mandiri, pindah tempat atau wilayah, dan menggunakan celah hukum supaya terhindar dari penggunaan pajak. Penerimaan pajak di Indonesia pada sektor manufaktur hingga akhir desember 2019 mencapai Rp. 365,39 triliun. Jumlah ini

tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari pencapaian tahun 2018 yang mampu tumbuh 10,9%.

Sebagian masyarakat Indonesia merasa pembayaran biaya pajak pada pemerintah tidak memberi feedback secara langsung, dengan begitu perusahaan seringkali merasa terbebani dan enggan dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pemerintah tidak menginginkan adanya peran perusahaan dalam praktik penghindaran pajak, karena hal ini dianggap perusahaan tidak berantusias pada pemerintah terhadap penyelenggaraan negara dan biaya fasilitas untuk publik. Harapan pemerintah yaitu perusahaan dapat membayarkan pajak dengan tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Manajemen perusahaan masih berupaya agar labanya maksimal, hal ini yang menjadikan alasan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yang dianggap tidak baik untuk masyarakat.

Capital Intensity dapat diartikan sebagai investasi perusahaan pada aset tetap yang dianggap salah satu aset yang digunakan perusahaan sebagai produksi dan mendapatkan laba. Investasi pada aset tetap dapat mengakibatkan adanya beban depresiasi atau penyusutan dari aset tetap yang telah diinvestasikan. Besar kecilnya beban penyusutan untuk aset tetap didalam peraturan perpajakan di Indonesia beraneka ragam tergantung dari jenis aset tetap tersebut (Sukartha, 2017).

Semakin tinggi laba yang meningkat, maka menyebabkan profitabilitas semakin tinggi pula. Profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan tingginya *tax avoidance* perusahaan, hal ini dikarena perusahaan yang memiliki laba tinggi semakin leluasa memanfaatkan kelemahan terhadap pengelolaan biaya pajak perusahaannya (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). *Leverage* atau tingkat

pendanaan, biaya bunga yang makin tinggi dapat berpengaruh berkurangnya biaya pajak suatu perusahaan (Sukartha, 2017). Berkurangnya biaya pajak tersebut, perusahaan lebih condong dalam meminimalkan perlakuan *tax avoidance*. Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan dengan ukuran besar (mempunyai aset yang besar) dapat lebih menstabilkan laba ketika dibanding dengan perusahaan yang memiliki total aset lebih kecil. Perusahaan dengan laba besar dan juga stabil lebih meningkatkan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin besar beban pajaknya besar juga, hal seperti ini dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah beban pajak, dengan begitu perusahaan lebih terdorong untuk menggunakan praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Budhi & Dharma, 2017) mengemukakan *capital intensity* berpengaruh positif pada *tax avoidance*, yang dapat diartikan bahwa *capital intensity* yang semakin tinggi dapat menyebabkan semakin tinggi pula *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019) yang juga mengungkapkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Khoiriyah, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif pada penghindaran pajak. Tetapi pada (Gartika & Wijaya, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian (Dwiyanti & Jati, 2019) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gartika & Wijaya, 2018) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Khoiriyah, 2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Begitu pula dengan (Rifai & Atiningsih, 2019) mengungkapkan leverage tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Khoiriyah, 2018) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh (Gartika & Wijaya, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk investigasi ulang dan modifikasi dari penelitian sebelumnya adakah pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, penelitian yang saya lakukan masih layak untuk dilakukan sebab terdapat perbedaan hasil yang terjadi antar satu dengan lainnya, yang menjadi peluang untuk peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti ini akan menguraikan tentang pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sehingga rumusan masalah pada penelitian yaitu:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji secara empiris tentang ada tidaknya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Menganalisis dan menguji secara empiris tentang ada atau tidak pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Menganalisis dan menguji secara empiris tentang ada atau tidak pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Menganalisis dan menguji secara empiris tentang ada atau tidak pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar memperoleh manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Dimana manfaat penelitian ini terbagi dalam 2 kategori yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut manfaat dari penelitian antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar penelitiannya bisa dipakai sebagai bahan wacana bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dalam bidang pengembangan ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi Perpajakan. Dimana pada penelitian ini membahas tentang penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris dan juga memberikan kontribusi tambahan dalam penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Manufaktur

Peneliti berharap agar penelitiannya menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan tax avoidance secara tepat dan juga efisien tanpa melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dilakukan supaya pemerintah, khususnya DJP dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku pada saat ini sesuai perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang berat bagi perusahaan yang melanggar.

c. Bagi Investor

Penelitian ini mempunyai partisipasi bagi investor untuk menilai kualitas laba dan juga tingkat penghindaran pajak sebelum pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Informasi yang diterima dan Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar melakukan penilaian lebih dalam dalam pengambilan keputusan tersebut.